

## PEMBIAYAAN SMK NEGERI DAN SWASTA DI DIY DALAM ERA OTONOMI

Oleh:

**Wagiran**

**Didik Nurhadiyanto**

Universitas Negeri Yogyakarta

### *Abstract*

*This research aims to describe vocational high schools (VHS) educational budget pattern, its problems, and also the effort solve the problems. This research was conducted at state as well as private VHSs in Yogyakarta. A sample of 11 state and 26 private VHSs was established. Data were collected by using questionnaire, interview, and document, and then analyzed both quantitatively and qualitatively. The results indicate that: (a) Educational budget of state and private VHSs comes from government finance and parents support category, (b) Educational budget of state VHSs come more from government than from parents support, whereas that of private VHSs come more from parents than from government, (c) the biggest problem faced by state as well as private VHSs is the delay of payment from the government and the parents.*

**Keyword:** *Educational Budget Patterns, Vocational High School (SMK)*

### **Pendahuluan**

Pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM khususnya tenaga kerja tingkat menengah. Hal ini didasarkan pada proyeksi kebutuhan

tenaga kerja di masa mendatang yang memerlukan tenaga terampil tingkat menengah dalam jumlah yang besar. Pengalaman di lapangan maupun data proyeksi perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa ditinjau dari prospek kebutuhan maupun kelayakan ekonomisnya pendidikan kejuruan masih merupakan investasi yang cukup baik dalam mempersiapkan tenaga terampil tingkat menengah (Sukanto, 1998). Hasil analisis biaya-manfaat yang dilakukan Abbas (2000) menunjukkan bahwa secara keseluruhan investasi di sekolah lanjutan tingkat atas baik SMU maupun SMK adalah menguntungkan. Selain itu ditemukan bahwa investasi di SMK terutama SMK Teknologi adalah investasi yang paling menguntungkan.

Perubahan paradigma pendidikan dari *supply driven* ke *demand driven* menuntut lembaga pendidikan turut bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, namun dituntut menghasilkan lulusan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam operasionalnya lembaga pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor biaya. Disadari bahwa untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan seiring tuntutan era global serta perkembangan iptek yang begitu cepat memerlukan pembiayaan yang makin besar. Tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi mustahil tujuan-tujuan tersebut akan tercapai.

Di tengah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, pendidikan kejuruan dihadapkan pada berbagai perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya turut serta berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan. Beberapa perubahan mendasar tersebut diantaranya dampak buruk krisis ekonomi, diterapkannya otonomi daerah dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Krisis ekonomi

yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, masih menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Krisis mengakibatkan turunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu mau tidak mau sekolah dituntut mampu menggali dana pembiayaan pendidikan secara mandiri, serta mampu meningkatkan peran masyarakat/dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan.

Diberlakukannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dalam berbagai bidang agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi setiap daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan kewenangannya kepada daerah. Dengan demikian manajemen pendidikan yang tadinya berada di pusat menjadi kewenangan daerah masing-masing. Sesuai dengan UU No 25 tahun 1999 (pasal 8), kewenangan daerah dalam berbagai bidang termasuk pendidikan ini akan diikuti dengan pelimpahan pembiayaan kepada daerah. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) erat kaitannya dengan pelaksanaan UU No 25 tahun 1999 yaitu mengubah mekanisme pengambilan keputusan dan kewenangan yang selama ini dilakukan oleh pusat dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memungkinkan dilaksanakannya asas desentralisasi di bidang pendidikan untuk memperbaiki sistem sentralisasi yang kaku. Desentralisasi pendidikan memberi keleluasaan dan kewenangan pada sekolah dan masyarakat setempat untuk mengelola pendidikan.

Penerapan MBS akan berimplikasi pula pada pembiayaan pendidikan. Strategi implementasi MBS jangan panjang memberikan kewenangan dan keleluasaan secara mandiri kepada sekolah

untuk mengelola maupun menggali dana pembiayaan pendidikan dengan kontrol komite sekolah. Jelas bahwa dengan diterapkannya MBS sekolah dituntut mampu secara mandiri dan kreatif untuk menggali dan mengelola sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.

Dari uraian di atas jelas bahwa dengan turunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, penerapan otonomi daerah maupun manajemen berbasis sekolah semuanya menuntut sekolah untuk lebih mandiri, kreatif, inovatif dalam menggali dan mengalokasikan berbagai sumberdaya dan sumber dana bagi pembiayaan pendidikan. Sekolah diberi keleluasaan dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya untuk membiayai pendidikan yang memang mahal.

Bagi sekolah dengan budaya kemandirian dan profesionalisme yang tinggi, perubahan paradigma pembiayaan pendidikan ini merupakan peluang untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber dana bagi pembiayaan pendidikan guna peningkatan mutu. Namun bagi sekolah dengan kemandirian rendah dan terbiasa bergantung kepada pemerintah, perubahan paradigma pembiayaan ini merupakan masalah yang amat berat dan tidak jarang kebutuhan pembiayaan yang teramat tinggi ini semata-mata dibebankan kepada siswa tanpa usaha untuk menggali sumber dana lain.

Bagaimana sebenarnya sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikannya, bagaiman sebenarnya SMK menyikapi perubahan paradigma pembiayaan tersebut, sudahkan SMK melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan? Penelitian ini bernaksud mengkaji pola pembiayaan siswa SMK negeri maupun swasta di DIY. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas

pendidikan kejuruan khususnya SMK. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di DIY
2. Bagaimana alokasi biaya pendidikan SMK Negeri dan Swasta di DIY dan besarnya sumber-sumber dana yang ada baik dari pemerintah pusat maupun daerah, orang tua, masyarakat, dunia usaha dan sumber lain
3. Berapa kebutuhan minimal biaya pendidikan SMK Negeri dan Swasta di DIY
4. Strategi apa saja yang dilakukan SMK Negeri dan Swasta di DIY dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan pendidikan
5. Hambatan apa saja yang dirasakan oleh SMK Negeri dan Swasta di DIY dalam memenuhi pembiayaan pendidikan dan upaya mengatasinya

### Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap SMK Negeri dan SMK Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan penelitian survey, dengan populasi penelitian seluruh SMK Negeri dan Swasta di DIY. Sampel diambil sebesar 37 SMK yang terdiri dari 11 SMK Negeri dan 26 SMK Swasta. Metode pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi serta wawancara.

Data kuantitatif yang diperoleh dari angket dan dokumentasi yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif. Sedangkan data yang sifatnya kualitatif hasil wawancara akan diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan saling melengkapi

yang mengkonfirmasi dengan temuan-temuan kuantitatif dari hasil angket.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis data pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di DIY menunjukkan bahwa pola yang digunakan adalah pola mandiri dan mandiri. Untuk SMK Negeri pola pembiayaan masih sebagian mengandalkan subsidi dari pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, kemudian diikuti pola mandiri yang didominasi iuran dari orangtua siswa. Untuk SMK Swasta pola mandiri lebih dominan dengan pembiayaan yang berasal dari iuran orangtua siswa, sedangkan subsidi dalam hal ini dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah lebih didapatkan secara tidak tetap secara keseluruhan pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rerata hasil penelitian sebesar 163,89 yang lebih besar dari rerata kriteria sebesar 145. Cukup baiknya pola pembiayaan ini dapat pula diamati dari kecenderungan skor pola pembiayaan secara keseluruhan. Dari 37 SMK sebanyak 34 SMK (91,88%) termasuk dalam katagori cukup baik dan baik dan hanya 3 SMK (8,11%) saja yang mempunyai kecenderungan sedang. Katagori skor tersebut dapat ditampilkan dalam tabel di bawah.

Tabel 1

Kecenderungan Skor Pola Pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di DIY

Rentang Skor	Kategori	SMK Negeri		SMK Swasta		Gabungan	
		f	(%)	f	(%)	f	(%)
189 - 232	Baik	3	27,27	0	0	3	8,11
145 - 188,5	Cukup Baik	8	72,73	23	88,46	31	83,78
101,5 - 144	Sedang	0	0	3	11,54	3	8,11
85 - 101	Rendah	0	0	0	0	0	0
Jumlah		11	100	26	100	37	100

Dari kecenderungan skor pola pembiayaan pada Tabel 1 tersebut tampak bahwa untuk SMK Negeri seluruhnya termasuk dalam katagori cukup baik dan baik, tidak ada yang tergolong dalam katagori sedang atau rendah. Hal ini berbeda dengan SMK Swasta yaitu sebagian besar tergolong cukup baik, dan tidak ada yang tergolong dalam katagori baik, dan katagori sedang sebesar 11,54%.

Apabila dilihat dari indikator pola pembiayaan SMK dapat diamati bahwa SMK Negeri maupun SMK Swasta secara sendiri-sendiri maupun bersama memiliki rata-rata skor hasil penelitian yang lebih besar dari rerata kriteria pada masing-masing indikator. Hal ini menunjukkan bahwa skor yang dicapai sudah berada di atas rata-rata. Skor pencapaian masing-masing indikator untuk SMK Negeri maupun SMK Swasta dapat ditampilkan dalam tabel di bawah:

Tabel 2  
Pencapaian Skor Masing-masing Indikator.  
Pola Pembiayaan SMK

Indikator	Pencapaian (%)		
	SMK Negeri	SMK Swasta	Gabungan
Penggalan dana/sumber dana	71,72	63,14	65,69
Pemanfaatan dana	82,39	74,84	77,08
Kecukupan dana	69,20	64,66	66,01
Pelibatan masyarakat/stakeholder	80,58	73,01	75,31
Ketersediaan Fasilitas	77,27	69,87	72,07
Semua indikator	75,31	68,67	70,64

Dari Tabel 2 tersebut tampak bahwa pada indikator penggalan dana, pencapaian skor untuk SMK Swasta lebih rendah dari SMK Negeri. Pada aspek penggalan dana SMK Swasta mempunyai skor yang paling rendah. Hal ini berarti bahwa kesulitan utama SMK Swasta adalah pada aspek penggalan dana. Rendahnya kemampuan penggalan dana pada SMK Swasta dapat ditegaskan dari jawaban pertanyaan butir 38 yang menyatakan bahwa 57,69% dari mereka merasa kurang mampu dalam menggali dana selain dari pemerintah dan orangtua siswa. Sedangkan untuk SMK Negeri justru sebaliknya. Sebanyak 63,63% SMK Negeri menyatakan mampu menggali dana selain dari pemerintah dan orangtua siswa. Selain itu dalam konteks otonomi berdasarkan jawaban butir nomor 50 terungkap bahwa sebagian besar SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakan ketidaksiannya bahwa dengan otonomi sekolah mampu menggali sumber dana yang lebih besar.

Dari berbagai uraian tersebut tampak bahwa penggalan dana masih merupakan masalah bagi SMK Negeri maupun SMK Swasta. Oleh karena itu upaya untuk menggali dana sebanyak-banyaknya dari sumber yang bervariasi perlu ditingkatkan. Dalam konteks otonomi SMK terutama SMK Swasta perlu dimotivasi agar mampu melaksanakan upaya tersebut.

Dalam pemanfaatan dana terlihat bahwa baik SMK Negeri maupun SMK Swasta mampu memanfaatkan dana yang ada secara tepat. Pemanfaatan dana secara tepat tersebut ditandai dengan kegiatan-kegiatan baik yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar maupun yang tidak berhubungan langsung dengan PBM. Sebagian besar SMK mampu memanfaatkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Aspek yang paling rendah pencapaiannya dalam pola pembiayaan SMK adalah pada kecukupan dana. Pada SMK Negeri, dalam aspek ini mempunyai pencapaian paling rendah, demikian juga pada SMK Swasta. Dalam aspek ini terlihat semua SMK memiliki keterbatasan. Pada indikator pelibatan masyarakat, semua SMK telah melakukannya. Masyarakat/orangtua mulai dilibatkan dalam ikut memberi pertimbangan kebijakan sekolah. Pada aspek ketersediaan fasilitas pun skor yang dicapai SMK Swasta lebih rendah dari SMK Negeri.

Dari deskripsi data di atas terlihat bahwa baik SMK Negeri maupun SMK Swasta semuanya masih merasakan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kemampuan pembiayaan meningkat.

Sumber-sumber dana bagi SMK Negeri dan SMK Swasta relatif sama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua siswa, masyarakat, *block grant* dan sumber lain. Perbedaan mencolok dari sisi sumber dana adalah: Sumbangan terbesar bagi

SMK Negeri adalah dari pemerintah (pusat/daerah), sedangkan bagi SMK swasta pemasukan terbesar adalah dari orangtua siswa.

Tampaknya upaya-upaya penggalan dana melalui unit produksi belum secara signifikan menunjang pembiayaan pendidikan. Sebagian besar SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakan bahwa sumbangan terkecil adalah dari unit produksi. Dengan data tersebut tentunya tidak akan mematikan semangat untuk menggali dana dari sektor lain. Unit produksi dengan segala variasinya perlu terus dikembangkan agar berperan secara signifikan dalam pembiayaan pendidikan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supriyadi (2003) terhadap 50 SMK Negeri yang menunjukkan bahwa dari seluruh dana yang tercatat dalam RAPBS sebagian besar (78,9%) dana berasal dari pemerintah, sebanyak 16,9% menjadi tanggungjawab keluarga siswa melalui dana rutin sekolah dan sumbangan lain dan hanya 4,2% dari masyarakat dan donatur lain. Lebih lanjut dikemukakan bahwa besarnya seluruh anggaran untuk gaji yang tercantum dalam RAPBS berasal dari pemerintah, maka sebanyak 99,5% dana pemerintah yang disalurkan ke sekolah untuk pembayaran gaji. Hal ini berarti kurang dari 1% dana dari pemerintah yang diterima SMK Negeri diperuntukkan bagi penyelenggaraan KBM.

Dari perhitungan di atas jelas bahwa upaya peningkatan mutu dan relevansi SMK tidak dapat menggantungkan diri dari dana pemerintah. Hal ini menuntut sekolah untuk aktif mencari sumber dana selain dari pemerintah. Upaya yang perlu dikembangkan utamanya dengan kemitraan dan optimalisasi unit produksi. Meskipun sumber pemasukan terbesar SMK Negeri dari pemerintah, namun sumbangan dari orangtua siswa juga mempunyai peran signifikan. Pada SMK Swasta jelas bahwa sumbangan terbesar dalam pembiayaan adalah dari orangtua siswa. Akan menjadi masalah bila kemampuan ekonomi orangtua siswa rendah yang

mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu upaya penggalan dana selain dari pemerintah maupun orangtua siswa menjadi sangat beralasan.

Dalam pengalokasian dana baik SMK Negeri maupun SMK swasta mempunyai prioritas yang sama yaitu pembiayaan pendidikan/alokasi dana terbesar adalah pada pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), sedangkan proses penyusunan anggaran antara SMK Negeri dan SMK Swasta memiliki pola yang sama yaitu diawali dengan rapat umum, rapat staf, dan keputusan kepala sekolah. Namun demikian pada SMK Negeri dalam menyusun RAPBS sudah melibatkan orangtua siswa maupun masyarakat melalui komite sekolah. Kebutuhan biaya minimal operasional antara SMK Negeri dan SMK Swasta relatif sama. Kebutuhan minimal operasional pertahun SMK Negeri berkisar antara 1 milyar rupiah sampai dengan 2 Milyar rupiah. Sedangkan biaya operasional per siswa per tahun berkisar antara 2 juta sampai dengan 2,3 juta rupiah. Sedangkan kebutuhan minimal operasional pertahun SMK Swasta berkisar antara 250 juta sampai dengan 1,4 Milyar. Sedangkan biaya operasional per siswa per tahun berkisar antara 560.000 sampai dengan 1,3 juta rupiah.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan ini adalah jenis SMK maupun jumlahnya. Untuk SMK Teknologi dan Industri baik Negeri maupun Swasta mempunyai biaya operasional maupun biaya per siswa per tahun yang lebih besar/paling besar dibanding SMK kelompok lain. Dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan baik SMK Negeri maupun SMK Swasta mempunyai pola yang sama dengan menempatkan skala prioritas serta subsidi silang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah menggali sumber dana dengan cara yang bervariasi.

Dari sisi hambatan, SMK Negeri maupun SMK Swasta sama-sama memiliki permasalahan serupa yaitu keterlambatan dalam pembayaran iuran sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan dari orang tua siswa sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dilakukan pihak SMK Negeri maupun Swasta dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan menerapkan skala prioritas dan menerapkan prinsip subsidi silang. Di samping itu upaya-upaya lainnya yang ditempuh adalah dengan mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pendidikan lainnya dengan membentuk dan mengembangkan unit produksi.

Dari berbagai bahasan di atas menjadi penting adalah bahwa SMK baik Negeri maupun SMK Swasta mulai menggali sumber-sumber pembiayaan baik dengan menjalin kerjasama usaha pola maupun melalui optimalisasi usaha jasa dan produksi. Dengan demikian diharapkan SMK tidak tergantung dari pemerintah atau orangtua siswa saja, serta menjamin tersedianya dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan. Diterapkannya otonomi daerah, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah, dan lainnya merupakan momentum yang tepat untuk mendukung upaya SMK dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pola pembiayaan SMK Negeri di DIY masih dominan mengandalkan subsidi dari pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, diikuti pola mandiri yang berasal dari iuran orangtua siswa. Sedangkan untuk SMK Swasta lebih dominan menggunakan pola mandiri dengan dana yang berasal dari iuran orangtua siswa. Subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah diterima

secara tidak tetap. Secara umum baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan pola pembiayaan SMK Negeri dan SMK Swasta di DIY tergolong dalam katagori cukup baik

2. Sebagian besar SMK Negeri (90%) menyatakan bahwa sumbangan terbesar berasal dari pemerintah daerah, dan hanya 10% SMK (20%) yang menyatakan sumbangan terbesar dari orangtua siswa. Semua SMK Swasta (100%) menyatakan bahwa sumbangan terbesar berasal dari orangtua siswa.
3. Sebagian besar SMK Negeri dan SMK Swasta menyatakan bahwa sumbangan dana terkecil berasal dari unit produksi,
4. Semua SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakan bahwa program yang diutamakan dibiayai adalah yang berkaitan langsung dengan PBM
5. Kebutuhan minimal operasional pertahun SMK Negeri berkisar antara 1 milyar rupiah sampai dengan 2 milyar rupiah. Sedangkan biaya operasional per siswa per tahun berkisar antara 2 juta sampai dengan 2,2 juta rupiah. Kebutuhan minimal operasional pertahun SMK Swasta berkisar antara 250 juta sampai dengan 1,4 Milyar. Sedangkan biaya operasional per siswa per tahun berkisar antara 560. 000 sampai dengan 1,3 juta rupiah. SMK Kelompok Teknologi dan Industri baik Negeri maupun Swasta mempunyai biaya operasional dan biaya per siswa per tahun paling besar dibanding SMK jenis lain.
6. Upaya yang dilakukan SMK Negeri maupun SMK Swasta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan adalah dengan mencari alternatif lain pemasukan sumber dana misalnya dengan membuka unit usaha produksi dan jasa melalui unit produksi, peningkatan peran orangtua siswa dalam pembiayaan, kerjasama

dengan industri serta menerapkan skala prioritas maupun subsidi silang dalam pembiayaan pendidikan.

Semua SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakan bahwa hambatan terbesar dalam pembiayaan adalah keterlambatan proses dalam pembayaran, yang dimungkinkan karena kondisi keuangan/ekonomi orangtua yang lemah.

Upaya yang dilakukan pihak SMK Negeri maupun SMK Swasta dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan menerapkan skala prioritas dan menerapkan prinsip subsidi silang.. mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pendidikan misalnya dengan membentuk dan mengembangkan unit produksi.

Isaran yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di DIY antara

1. Perlu dikembangkan upaya penggalian dana dari sumber yang bervariasi seiring dengan prinsip otonomi desentralisasi dalam kerangka manajemen berbasis sekolah

2. Sumbangan dana dari masyarakat dan duniausaha/industri bagi penyelenggaraan pendidikan masih kecil. Oleh karena itu SMK perlu meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/industri tidak hanya dalam program praktek industri maupun uji kompetensi, namun juga pada upaya mendukung pembiayaan.

3. Sebagian besar SMK sudah memiliki unit produksi namun demikian sumbangannya bagi pembiayaan pendidikan masih relatif kecil. Oleh karena itu perlu dioptimalkan operasional dan manajemen unit produksi .

### Daftar Pustaka

Abbas Ghozali. (2000). Analisis biaya-manfaat SMU dan IMA. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 022. Tahun ke-1. Hal. 57 – 85.

Sukamto. (1998). Orientasi dunia kerja dalam proses dan status akreditasi SMK. *Jurnal Kependidikan Edisi Khusus Desember Tahun XXXVIII*. Hal. 109 –126.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### Penulis:

Penulis adalah pakar pendidikan, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

## A COMPARATIVE STUDY OF GURUKULA AND PONDOK PESANTREN EDUCATIONAL SYSTEMS

By Real L. J. Gagnon

### Abstract

This study aims at getting a description of similarities and differences between the traditional educational systems of gurukula and pondok pesantren, and to gain an understanding of how changing ideologies and concepts in society are molding and altering the traditional educational systems of gurukula in India and pondok pesantren in Indonesia. This is a case study involving three gurukulas and three pondok pesantrens. The data indicate that there are some similarities and differences. The basic similarities are on: (1) the founder, leader, teacher, (2) teacher of knowledge, (3) place for students to stay, and (4) place for teaching and learning. The differences are on: (1) founder's status, (2) students' gender, (3) lineage, (4) ownership, (5) housing, and (6) succession system. From the survey findings, one can conclude that the conservative school of thought which is found in both the very traditional gurukula and the very traditional pondok pesantren differs substantially in its curriculum, objectives, and methods from the more modern gurukulas and pondok pesantrens. These more conventional institutions are firmly fixed in their ideology and are not about to accept changes, at least not major changes, as adopted by both the semi-modern and modern institutions. On the other hand, both the semi-modern and modern gurukulas and pondok pesantrens are more flexible and thus able to blend something of the old traditions and something of the new more modern ways.

Key words: traditional education systems, gurukula, pondok pesantren.